

**KEMITRAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI (Suatu Kajian  
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di PTPN VII Unit Usaha Cinta  
Manis Sumatera Selatan)**

**OLEH**

**ABDUL GHOFUR MUKHLIS  
04 115 028**

**SKRIPSI**

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MEMPER OLEH GELAR  
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

**Kemitraan Tebu Rakyat Intensifikasi (Sutau Kajian Pemberdayaan  
Ekonomi Rakyat di PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis Sumatera Selatan)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan 1) Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kemitraan TR di PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, 2) Menganalisis faktor yang mendorong dan menghambat perusahaan dan petani dalam melaksanakan kemitraan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dan pengambilan responden dengan *Proportionate Random Sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan TR di PTPN VII dilaksanakan melalui dua pola yaitu pola TR APBN dan pola TR Mandiri. Terdapat perbedaan pokok antara pola TR APBN dan TR Mandiri yaitu pola TR APBN mendapatkan fasilitasi dari pemerintah dan PTPN sedangkan TR Mandiri tidak mendapatkan fasilitasi dari pemerintah namun mendapat fasilitasi dari PTPN. Petani TR APBN mendapat fasilitasi berupa bantuan sarana produksi, kredit modal, bimbingan dan arahan dari PTPN dalam teknis budidaya tebu. Namun TR Mandiri hanya mendapatkan fasilitas berupa bimbingan dan arahan teknis budidaya tebu. Dalam konteks kemitraan dalam pelaksanaan hubungan kemitraan antara petani dengan PTPN VII terlihat bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab belum terlaksana serta belum terdapatnya sanksi yang tegas dan yang mengikat kedua belah pihak mitra. Meskipun kemitraan belum sepenuhnya terlaksana namun hubungan kemitraan telah memberikan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan pendapatan petani rata-rata Rp 1,2 juta/ha.

Faktor yang mendorong dalam program kemitraan TR bagi petani APBN adalah adanya perangkat peraturan yang terikat, mendapatkan fasilitasi, dan akses lahan. Faktor yang mendorong petani Mandiri adalah adanya perangkat peraturan yang terikat, akses lahan dan pasar. Faktor yang mendorong PTPN adalah tersedianya SDM, teknologi modern, peraturan pemerintah, bantuan dari pemerintah untuk petani, akses pasar yang jelas. Sedangkan faktor yang menghambat bagi petani APBN adalah terjadinya tumpang tindih lahan, lemahnya koordinasi dari pemerintah, lemahnya akses pemasaran, lemahnya sumber daya manusia, lemahnya pembinaan dan arahan dari PTPN. Faktor yang menghambat bagi petani Mandiri adalah peraturan pemerintah yang berpihak pada perusahaan, pembinaan yang lebih mengutamakan petani APBN, tumpang tindih lahan, kelemahan Sumber Daya Manusia dan persaingan akses pemasaran. Faktor penghambat perusahaan adalah adanya persaingan komoditi di tingkat petani, rendahnya disiplin karyawan, tumpang tindih lahan milik petani.

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumberdaya alam, yang menyebar diberbagai pelosok negeri. Setiap daerah memiliki potensi sumberdaya alam yang berbeda sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah tersebut (Dillon, 2004). Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya secara cermat dan tepat merupakan salah satu jalan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya guna dan daya nilai sumberdaya alam yang berada di Negara Indonesia (Jacub dan Kisman, 1991).

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan Bangsa Indonesia, maka dasar Bergeraknya pembangunan Indonesia adalah dengan menggerakkan pertanian. Sesuai dengan pernyataan Mubyarto (1989), bahwa pembangunan pertanian merupakan suatu proses perubahan fisik, ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan oleh manusia secara berkesinambungan untuk mendapatkan hasil dari usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan besar, perkebunan rakyat, kehutanan, perikanan dan peternakan. Dalam menggerakkan pembangunan pertanian haruslah memenuhi syarat untuk melakukan kinerja pembangunan pertanian yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan (Mosher, 1973).

Pertanian tidak lagi dipandang sebagai kegiatan budaya masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat sekitarnya. Sektor pertanian perlu dijadikan salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan terutama petani (Subejo, 2005).

Salah satu pengembangan sektor pertanian adalah agroindustri atau industri pertanian yang bertujuan untuk mengelola hasil produk pertanian yang akan meningkatkan nilai tambah yang lebih besar dari produk primernya yang akan meningkatkan permintaan terhadap produk *on-farm* yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dapat dilakukan melalui industrialisasi di pedesaan dengan memanfaatkan teknologi dan kekuatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia desa (Anonim, 2005).

Salah satu sub-sektor pertanian yang bergerak dalam industry adalah sub-sektor perkebunan. Sub-sektor perkebunan merupakan salah satu sub-sektor yang berperan penting dalam kaitannya dengan Produk Domestik Bruto, serapan tenaga kerja, perdagangan dan penerimaan pemerintah sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan sub-sektor perkebunan ditujukan untuk meningkatkan pembangunan dan pemerataan. Perkembangan sub-sektor perkebunan dari tahun 1970-an hingga saat ini secara kuantitatif cukup memuaskan, tetapi secara kualitatif masih belum seperti yang diharapkan (Fadjar, 2006).

Pengembangan sub-sektor perkebunan telah dilakukan sejak pemerintahan Belanda selain mengelola perkebunan sendiri atau besar dan juga melakukan pengembangan melalui perkebunan rakyat namun terjadi ketimpangan. Ketimpangan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat (PR) terlihat dari perkebunan besar relatif maju karena mereka menguasai aset produksi (lahan, teknologi, tenaga kerja, sarana produksi dan alat produksi) dan menguasai pasar secara penuh, sedangkan perkebunan rakyat hanya mempunyai aset tenaga kerja dan lahan (Fadjar, 2006). Perkebunan rakyat yang luasnya sekitar 80% dari perkebunan nasional belum mendapatkan fasilitas dan perlindungan yang memadai dari pemerintah (Drajat, 2007).

Menurut Daim (2007), perkembangan usaha perkebunan sampai pada pertengahan Pelita II, menunjukkan bahwa perkebunan rakyat dan perkebunan besar tumbuh dalam kondisi yang sangat berbeda. Perkebunan besar memiliki kemampuan teknologi, manajemen, pasar dan sosial ekonomi, sedangkan perkebunan rakyat mempunyai karakteristik produktivitas yang rendah tidak memiliki akses pasar, usaha tani yang kecil dan terpencar serta kondisi sosial ekonomi yang lemah. Untuk mengurangi ketimpangan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat maka dilakukan program pengintegrasian antara keduanya secara intensif melalui program NES (*Nucleus Estate Smallholder*) atau PIR-BUN (Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan) yang selanjutnya dikenal dengan program kemitraan (Fadjar, 2006).

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola kemitraan TR di PTPN dilaksanakan melalui dua pola yaitu pola TR APBN dan Pola TR Mandiri. Terdapat perbedaan pokok antara pola TR APBN dengan Pola TR Mandiri yaitu TR APBN mendapat fasilitas dari pemerintah dan PTPN sedangkan TR Mandiri tidak mendapat fasilitas dari pemerintah namun mendapat fasilitas dari PTPN. Petani TR APBN mendapatkan fasilitas berupa bantuan sarana produksi, kredit modal, bimbingan dan arahan dari PTPN dalam teknis budidaya tebu. Namun TR Mandiri hanya mendapatkan fasilitasi bimbingan dan arahan teknis budidaya tebu. Dalam konteks kemitraan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab belum terlaksana serta belum adanya sanksi yang tegas dan mengikat kedua pihak mitra. Meskipun kemitraan belum sepenuhnya terlaksana, namun telah terdapat pemberdayaan ekonomi rakyat dengan pendapatan rata-rata petani Rp 1,2 juta/ha.
2. Faktor yang mendorong petani TR APBN dalam program kemitraan TR adalah adanya perangkat peraturan yang terikat, mendapatkan fasilitasi, dan akses lahan. Faktor yang mendorong petani Mandiri adalah adanya perangkat peraturan yang terikat, akses lahan dan pasar. Faktor yang mendorong PTPN adalah tersedianya SDM, teknologi modern, peraturan pemerintah, bantuan dari pemerintah untuk petani, akses pasar yang jelas. Sedangkan faktor yang menghambat bagi petani APBN adalah terjadinya tumpang tindih lahan, lemahnya koordinasi dari pemerintah, lemahnya akses pemasaran, lemahnya sumber daya manusia, lemahnya pembinaan dan arahan dari PTPN. Faktor yang menghambat bagi petani Mandiri adalah peraturan pemerintah yang berpihak pada perusahaan, pembinaan yang lebih mengutamakan petani APBN, tumpang tindih lahan, kelemahan Sumber Daya Manusia dan persaingan akses pemasaran. Faktor

## DAFTAR PUSTAKA

- [Anonim]. 2005. *Draf Revitalisasi Pertanian Melalui Agroindustri Pedesaan*. Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan. <http://deptan.go.id> [2 Februari 2008].
- Arsyad. Linconi. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Ariani. R. 2001. *Analisis Tingkat Efisiensi Kemitraan Usaha Di Kota Payakumbuh*. [Tesis]. Padang. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Arifin. Bustanul. 2005. *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. Grasindo. Jakarta.
- Bahari. Syaiful. 2004. *Kegagalan Pembangunan Pertanian di Indonesia*. <http://www.estananto's blog.com>. [28 Februari 2008].
- Banoewidjojo. M. 1984. *Pembangunan Pertanian*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Bisuk. Siahaan. 1996. *Industrialisasi di Indonesia*. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jakarta.
- Birowo. A.T. 1979. *Pembangunan Ekonomi Yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Daniri. Mas Achmad. 2008. *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. <http://www.danamandiri.com> [ 2 Maret 2008].
- Daniel. Mochar. 2003. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Darwato. Harry. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Masyarakat Terpencil*. <http://www.bappenas.go.id>. [2 Maret 2008].
- Daim. Chaimudin. 2007. *Pengembangan Kemitraan dan Dukungan Pendanaan Di Bidang Perkebunan*. <http://www.ipard.com> [1 Maret 2008].
- Daniri. Mas Achmad. 2006. *Standar Tanggung Jawab Perusahaan*.
- Dillon. 2004. *Pembangunan Pertanian Mandiri*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Drajat. Bambang. 2004. *Kinerja Subsektor Perkebunan: Evaluasi Masa Lalu (1994-1998) dan Prospek pada Era Perdagangan Bebas Dunia (2003-2008)*. <http://www.ipard.com>. [1 Maret 2008].
- . 2007. *Dinamika Lingkungan Nasional dan Global Perkebunan: Implikasi Strategis bagi Pembangunan Perkebunan*. <http://www.ipard.com>. [1 Maret 2008].